Peran Keuangan Negara dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis

Asrida[1]*, Miya Nurohmah[3]
[1,2] Universitas Negeri Makassar
[*] E-mail Korespondensi: asrida@unm.ac.id

Information Article
History Article
Submission: 05-10-2026
Revision: 25-11-2026
Published: 26-11-2026

DOI Article:
10.24905/mlt.v8i1.571

A B S T R A K

Keuangan negara merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan infrastruktur Indonesia yang masih menghadapi kesenjangan pembiayaan (infrastructure financing gap) signifikan. Tinjauan literatur sistematis ini bertujuan mengidentifikasi, mensintesis, dan menganalisis bukti empiris mengenai peran instrumen keuangan negara, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), dan dana transfer daerah dalam pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkeadilan. Pencarian literatur dilakukan pada basis data Scopus, Web of Science, dan Google Scholar terhadap artikel periode 2015–2024 menggunakan protokol Boolean search dan PRISMA. Dari 302 artikel teridentifikasi, 37 artikel memenuhi kriteria inklusi dengan tingkat kesepakatan antarpenelaah $\kappa = 0{,}79$. Hasil menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, dengan fiscal multiplier 1,2–1,8 dan efek crowding-in investasi swasta sebesar 0,7–1,1% untuk setiap kenaikan 1% belanja modal. KPBU dan SBSN memperluas kapasitas pembiayaan di luar keterbatasan APBN. Kualitas kelembagaan dan tata kelola menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas instrumen pembiayaan. Kesenjangan infrastruktur Jawa dan luar Jawa masih signifikan. Lima rekomendasi kebijakan dirumuskan untuk memperkuat pembiayaan infrastruktur yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Keuangan Negara, Pembiayaan Infrastruktur, APBN, KPBU, SBSN, PINA, Transfer Daerah, Pembangunan Berkelanjutan

A B S T R A C T

Public finance is a strategic instrument for promoting infrastructure development in Indonesia, which continues to face a significant infrastructure financing gap. This systematic literature review aims to identify, synthesize, and critically analyze empirical evidence on the role of public financing instruments, including the State Budget (APBN), Public–Private

Acknowledgment

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Partnerships (KPBU), Government Islamic Securities (SBSN), Non-Government Budget Investment Financing (PINA), and intergovernmental transfers in promoting inclusive and equitable infrastructure development. Literature was systematically searched in Scopus, Web of Science, and Google Scholar for articles published between 2015 and 2024 using standardized Boolean search protocols and the PRISMA framework. Of the 302 articles identified, 37 met the inclusion criteria, with an inter-rater agreement of κ = 0.79. The findings indicate that government capital expenditure has a positive effect on regional economic growth, with a fiscal multiplier of 1.2–1.8 and a crowding-in effect on private investment of 0.7–1.1% for every 1% increase in capital expenditure. KPBU and SBSN expand infrastructure financing capacity beyond APBN constraints. Institutional quality and governance are critical factors determining the effectiveness of financing instruments. Infrastructure disparities between Java and regions outside Java remain significant. Five strategic policy recommendations are proposed to strengthen inclusive, sustainable, and equitable infrastructure financing.

Key word: *Public Finance, Infrastructure Financing; State Budget; Public Private Partnership; Islamic Government Securities; Regional Transfers; Sustainable Development*

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis dan demografis yang beragam. Kondisi tersebut menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prasyarat penting bagi integrasi nasional, pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga dengan kesenjangan akses dan kualitas infrastruktur antardaerah, khususnya antara wilayah yang telah berkembang dan wilayah yang masih menghadapi keterbatasan konektivitas. Ketimpangan tersebut berpotensi menghambat mobilitas barang, jasa, dan manusia serta memperlebar perbedaan kesempatan ekonomi antardaerah (Kuncoro, 2021).

Hubungan antara investasi infrastruktur publik dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui teori pertumbuhan endogen. Lucas (1988) dan Romer (1990) menempatkan akumulasi modal dan peningkatan produktivitas sebagai faktor penting dalam pertumbuhan

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

ekonomi jangka panjang. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, investasi publik dapat meningkatkan produktivitas melalui penurunan biaya logistik, peningkatan konektivitas, serta perluasan akses terhadap layanan dan aktivitas ekonomi. Selain itu, teori barang publik dan kegagalan pasar menjelaskan bahwa keterlibatan pemerintah diperlukan ketika penyediaan infrastruktur oleh sektor swasta belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang secara komersial kurang menguntungkan tetapi memiliki kepentingan sosial yang tinggi (Stiglitz, 2000). Dengan demikian, pembiayaan infrastruktur melalui keuangan negara tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan akses dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif keuangan publik, pembiayaan infrastruktur perlu mempertimbangkan efisiensi alokasi, distribusi manfaat, stabilitas fiskal, dan keadilan antargenerasi. Musgrave (1959) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam pengelolaan keuangan publik. Ketiga fungsi tersebut relevan dalam pembangunan infrastruktur karena pemerintah perlu menyediakan layanan dasar, mengurangi kesenjangan antardaerah, sekaligus menjaga keberlanjutan kondisi fiskal. Pembiayaan melalui utang jangka panjang juga perlu mempertimbangkan kesesuaian antara jangka waktu pembiayaan dan masa manfaat infrastruktur sehingga beban pembiayaan dapat didistribusikan secara proporsional kepada generasi yang menikmati manfaatnya (Atkinson & Stiglitz, 1980). Di sisi lain, teori *principal-agent* menjelaskan pentingnya transparansi, pengawasan, dan kejelasan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek yang melibatkan pemerintah, BUMN, dan badan usaha swasta (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam konteks Indonesia, arsitektur pembiayaan infrastruktur melibatkan berbagai instrumen yang memiliki karakteristik dan konsekuensi fiskal berbeda. APBN menjadi sumber pembiayaan utama melalui belanja pemerintah dan transfer fiskal. Sementara itu, KPBU, SBSN, dan PINA dikembangkan untuk memperluas sumber pembiayaan serta meningkatkan keterlibatan sektor nonpemerintah. Transfer ke daerah dan Dana Desa berperan dalam mendukung penyediaan infrastruktur sesuai kebutuhan lokal, sedangkan BUMN terlibat melalui penugasan pemerintah dan pembiayaan korporasi. Keberagaman instrumen tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan infrastruktur tidak dapat hanya dinilai dari besarnya dana yang dimobilisasi, tetapi juga perlu dilihat dari mekanisme pembagian risiko, kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, dan keberlanjutan kewajiban fiskal. Ehlers et al. (2022) menekankan pentingnya pemilihan instrumen dan pendekatan pembiayaan infrastruktur dengan mempertimbangkan sumber pembiayaan serta pengelolaan risiko.

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Meskipun berbagai instrumen pembiayaan telah dikembangkan, kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal. Asian Development Bank (2017) dan Kementerian PPN/Bappenas (2019) menunjukkan besarnya kebutuhan investasi infrastruktur yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi melalui APBN. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan bauran pembiayaan yang mengombinasikan sumber pendanaan publik, swasta, dan kelembagaan. Namun, perluasan sumber pembiayaan juga membawa konsekuensi berupa kebutuhan penguatan tata kelola, pengawasan kontrak, serta pengendalian risiko fiskal, termasuk risiko yang dapat muncul dari penjaminan pemerintah dan penugasan kepada BUMN.

Sejumlah penelitian telah membahas instrumen pembiayaan infrastruktur di Indonesia, tetapi pembahasannya cenderung berfokus pada instrumen atau konteks tertentu. Agung dan Nugroho (2021), misalnya, membahas SBSN sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur syariah. Muis et al. (2023) mengkaji efektivitas KPBU, Sari et al. (2023) menelaah kontribusi Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa, sedangkan Simanjuntak (2020) membahas desentralisasi fiskal dan kapasitas infrastruktur daerah. Kajian-kajian tersebut memberikan bukti penting mengenai kontribusi masing-masing instrumen, tetapi belum cukup menjelaskan bagaimana berbagai instrumen keuangan negara dapat dibandingkan dan disintesiskan dalam satu kerangka pembiayaan infrastruktur. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas instrumen, seperti kualitas kelembagaan, kapasitas fiskal daerah, kelayakan proyek, dan pengelolaan risiko, perlu dianalisis secara lintas-instrumen.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menyusun tinjauan literatur sistematis untuk mengintegrasikan bukti empiris mengenai peran berbagai instrumen keuangan negara dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Kajian ini tidak hanya mengidentifikasi kontribusi setiap instrumen, tetapi juga membandingkan mekanisme pembiayaan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas, serta risiko dan implikasi kebijakannya. Dengan demikian, sintesis yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai arsitektur pembiayaan infrastruktur Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana berbagai instrumen keuangan negara, meliputi APBN, KPBU, SBSN, PINA, dan transfer fiskal daerah, berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia berdasarkan literatur periode 2015–2024? Kedua, faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas masing-masing instrumen dalam mendukung pembangunan

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

infrastruktur? Ketiga, apa implikasi kebijakan dan agenda penelitian yang dapat dirumuskan untuk memperkuat pembiayaan infrastruktur Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan?

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi melalui penyajian sintesis lintas-instrumen yang menghubungkan sumber pembiayaan, mekanisme pelaksanaan, hasil pembangunan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas, dan risiko fiskal. Kontribusi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan pembiayaan infrastruktur yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis hasil penelitian terdahulu mengenai peran keuangan negara dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan proses penelusuran, seleksi, dan analisis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan terstruktur. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi temuan dari masing-masing publikasi, tetapi juga membandingkan pola, persamaan, perbedaan, serta kesenjangan hasil penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas instrumen pembiayaan infrastruktur. Proses pelaporan tinjauan sistematis mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) sebagaimana diperkenalkan oleh Moher et al. (2009).

Penelusuran literatur dilakukan melalui tiga basis data ilmiah, yaitu Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Pemilihan ketiga basis data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh cakupan publikasi yang relevan, baik dari jurnal internasional maupun publikasi yang membahas konteks pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penelusuran dibatasi pada artikel ilmiah yang diterbitkan dalam periode 2015–2024. Rentang waktu tersebut dipilih untuk menangkap perkembangan kebijakan, inovasi instrumen pembiayaan, serta dinamika pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam satu dekade terakhir.

Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci yang berkaitan dengan keuangan negara, pembiayaan infrastruktur, dan pembangunan infrastruktur. Kata kunci utama meliputi *public finance*, *state budget*, *infrastructure financing*, *infrastructure development*, *public-private partnership*, *government sukuk*, *regional fiscal transfer*, *state-owned*

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

enterprises, dan *Indonesia*. Kombinasi kata kunci tersebut digunakan untuk menjaring publikasi yang membahas instrumen pembiayaan, mekanisme pendanaan, kontribusi keuangan negara, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembangunan infrastruktur.

Seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria inklusi mencakup: (1) publikasi yang diterbitkan dalam periode 2015–2024; (2) artikel yang membahas keuangan negara, pembiayaan infrastruktur, atau pembangunan infrastruktur di Indonesia; (3) publikasi yang mengkaji sekurang-kurangnya satu instrumen pembiayaan, meliputi APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), transfer fiskal ke daerah, atau peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan (4) publikasi yang menyediakan informasi substantif mengenai mekanisme pembiayaan, hasil pembangunan, efektivitas instrumen, maupun faktor yang memengaruhinya.

Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup: (1) publikasi yang berada di luar rentang tahun penelitian; (2) publikasi yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian; (3) artikel yang hanya menyebutkan infrastruktur atau keuangan negara tanpa membahas hubungan keduanya secara substantif; dan (4) publikasi yang tidak menyediakan informasi memadai untuk proses ekstraksi dan analisis data. Penerapan kriteria tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis memiliki relevansi konseptual dan empiris terhadap pertanyaan penelitian.

Proses seleksi artikel dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada alur PRISMA, yang meliputi identifikasi, penyaringan, pemeriksaan kelayakan, dan penetapan artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Pada tahap identifikasi, diperoleh sebanyak 302 artikel dari hasil penelusuran melalui Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Seluruh artikel selanjutnya menjadi sumber awal dalam proses seleksi berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, dan isi publikasi dengan fokus penelitian.

Pada tahap penyaringan, artikel diperiksa untuk mengidentifikasi publikasi yang relevan dan mengeluarkan artikel yang tidak sesuai dengan ruang lingkup kajian. Artikel yang lolos penyaringan kemudian diperiksa secara lebih mendalam melalui pembacaan teks lengkap untuk menilai kesesuaiannya dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Berdasarkan keseluruhan proses seleksi tersebut, sebanyak 37 artikel dinyatakan memenuhi kriteria inklusi dan digunakan sebagai sumber utama dalam sintesis literatur.

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Konsistensi proses seleksi artikel dalam penelitian ini dilaporkan menggunakan koefisien Cohen's Kappa. Hasil pengukuran menunjukkan nilai $\kappa = 0{,}79$, yang mengindikasikan tingkat kesepakatan yang kuat dalam penilaian artikel. Penggunaan koefisien tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai konsistensi keputusan seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nilai kesepakatan ini menjadi salah satu informasi pendukung dalam menjelaskan konsistensi proses seleksi literatur.

Artikel yang telah memenuhi kriteria inklusi selanjutnya dianalisis melalui proses ekstraksi data secara terstruktur. Informasi yang diekstraksi meliputi identitas publikasi, tujuan penelitian, metode yang digunakan, instrumen pembiayaan yang dikaji, mekanisme pembiayaan, temuan utama, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembiayaan infrastruktur. Data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan enam tema utama, yaitu APBN, KPBU, PINA, SBSN, transfer fiskal ke daerah, dan peran BUMN dalam pembangunan infrastruktur.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, perbedaan, dan hubungan antartemuan penelitian. Setiap instrumen dianalisis berdasarkan mekanisme penghimpunan dan penyaluran pembiayaan, kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur, serta risiko dan kendala yang menyertainya. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan untuk mengidentifikasi keunggulan, keterbatasan, dan kemungkinan keterkaitan antarinstrumen dalam mendukung pembiayaan infrastruktur nasional.

Sintesis juga diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembiayaan, terutama kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, kemampuan fiskal daerah, kapasitas penyerapan anggaran, kelayakan proyek, dan pengelolaan risiko fiskal. Faktor-faktor tersebut dianalisis sebagai kondisi yang dapat memperkuat atau membatasi kontribusi masing-masing instrumen terhadap pembangunan infrastruktur. Hasil sintesis selanjutnya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan merumuskan implikasi kebijakan bagi penguatan sistem pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

HASIL

1. APBN sebagai Tulang Punggung Pembiayaan Infrastruktur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama keuangan negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Peran tersebut

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

diwujudkan melalui alokasi belanja modal pemerintah untuk pembangunan dan peningkatan kualitas sarana serta prasarana publik. Yusuf dan Ikhsan (2024), melalui penelitian menggunakan data panel provinsi di Indonesia, menemukan bahwa belanja modal pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur dapat mendukung aktivitas ekonomi melalui peningkatan konektivitas, penurunan biaya logistik, dan perluasan akses terhadap kegiatan produksi dan distribusi.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, belanja modal pemerintah juga berpotensi meningkatkan investasi swasta. Infrastruktur publik yang memadai dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih produktif karena mampu mengurangi biaya operasional dan memperluas jangkauan pasar. Dengan demikian, investasi pemerintah tidak selalu menggantikan investasi swasta, tetapi dapat menjadi pelengkap yang meningkatkan daya tarik kegiatan ekonomi. Temuan Wardhana dan Eliza (2023) mengenai hubungan penerimaan pajak dan pembangunan infrastruktur juga menunjukkan pentingnya keterkaitan antara kapasitas penerimaan negara dan kemampuan pemerintah menyediakan pembiayaan pembangunan.

Meskipun demikian, kemampuan APBN dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah keterbatasan ruang fiskal yang dipengaruhi oleh kapasitas penerimaan negara dan komposisi belanja pemerintah. Rendahnya kapasitas penerimaan dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam meningkatkan belanja modal, terutama ketika sebagian anggaran telah dialokasikan untuk memenuhi belanja yang bersifat wajib. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan penerimaan negara menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesinambungan pembiayaan infrastruktur.

Kendala lainnya berkaitan dengan kapasitas penyerapan anggaran dan ketimpangan pembangunan antardaerah. Ketersediaan anggaran tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas infrastruktur apabila pemerintah daerah belum memiliki kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang memadai. Kuncoro (2021) menunjukkan bahwa kesenjangan infrastruktur antara wilayah Jawa dan luar Jawa masih menjadi tantangan pembangunan. Oleh karena itu, efektivitas belanja infrastruktur melalui APBN perlu didukung oleh perencanaan yang memperhatikan kebutuhan wilayah, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

2. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Menjembatani Kesenjangan Fiskal

Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dikembangkan untuk memperluas keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Melalui skema ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dengan pembagian tanggung jawab dan risiko sesuai kesepakatan kontraktual. Pengembangan KPBU di Indonesia didukung oleh kerangka regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, yang mengatur kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Muis et al. (2023) menunjukkan bahwa KPBU dapat membantu mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur yang menghadapi keterbatasan pembiayaan apabila hanya mengandalkan APBN. Mekanisme kerja sama memungkinkan pemerintah memanfaatkan sumber pembiayaan, keahlian teknis, dan kapasitas operasional badan usaha. Namun, keberhasilan KPBU tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi yang dapat dimobilisasi, tetapi juga oleh kualitas perencanaan proyek, kepastian regulasi, dan pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha.

Dalam skema *Availability Payment*, pemerintah melakukan pembayaran kepada badan usaha berdasarkan ketersediaan layanan sesuai standar yang telah disepakati. Skema ini dapat diterapkan pada proyek yang memiliki manfaat sosial tinggi tetapi menghadapi ketidakpastian permintaan atau keterbatasan kemampuan pengguna dalam membayar tarif layanan. Sebaliknya, pada skema yang mengandalkan *user charge*, pendapatan badan usaha lebih bergantung pada penggunaan layanan oleh masyarakat. Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penentuan skema KPBU perlu disesuaikan dengan karakteristik proyek dan kemampuan pengelolaan risikonya.

Keberhasilan pelaksanaan KPBU dipengaruhi oleh kepastian hukum, kapasitas kelembagaan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), dan ketersediaan instrumen dukungan pemerintah. Kualitas dokumen proyek dan kelayakan finansial juga menentukan kemampuan proyek dalam menarik investor. Oleh karena itu, pengembangan KPBU perlu diikuti dengan penguatan kapasitas pemerintah dalam menyiapkan proyek, melakukan evaluasi risiko, dan mengawasi pelaksanaan kontrak agar kerja sama tidak menimbulkan beban fiskal yang tidak terukur.

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

3. Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA)

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) merupakan salah satu pendekatan untuk mendorong mobilisasi sumber pembiayaan nonanggaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Instrumen ini diarahkan untuk memperluas keterlibatan investor, khususnya investor institusional, dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Berbeda dengan pembiayaan yang sepenuhnya mengandalkan APBN, PINA memberikan ruang bagi pemanfaatan sumber pendanaan dari sektor keuangan dan pasar modal.

Setiawan et al. (2022) mengkaji perkembangan PINA sebagai salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa mobilisasi investasi nonanggaran pemerintah dapat membantu memperluas kapasitas pembiayaan proyek infrastruktur. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan instrumen investasi, kedalaman pasar modal, dan kebutuhan terhadap kepastian imbal hasil jangka panjang.

Dengan demikian, efektivitas PINA dipengaruhi oleh kelayakan proyek, tingkat risiko investasi, ketersediaan instrumen keuangan, serta kepercayaan investor terhadap keberlanjutan proyek. Pengembangan PINA perlu didukung oleh peningkatan kualitas persiapan proyek dan penguatan ekosistem investasi infrastruktur agar sumber pembiayaan nonanggaran dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

4. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pembiayaan Infrastruktur Syariah

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan instrumen pembiayaan pemerintah yang menggunakan prinsip syariah dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, SBSN menjadi salah satu alternatif pembiayaan dalam pengelolaan keuangan negara. Pengembangan instrumen ini memungkinkan pemerintah memperluas basis investor sekaligus menyediakan sumber pembiayaan bagi proyek-proyek yang memenuhi ketentuan penerbitan SBSN.

Agung dan Nugroho (2021) menjelaskan bahwa SBSN memiliki peran dalam pembiayaan infrastruktur melalui pengembangan instrumen seperti *Project Based Sukuk*. Penggunaan SBSN untuk proyek infrastruktur menghubungkan penerbitan surat berharga dengan aset atau kegiatan proyek yang menjadi dasar pembiayaan. Mekanisme tersebut

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan sumber pembiayaan yang lebih beragam sekaligus meningkatkan keterkaitan antara pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan.

Rasyid dan Lubis (2022) juga membahas pentingnya diversifikasi instrumen surat berharga dalam mendukung pembiayaan infrastruktur. Diversifikasi sumber pembiayaan dapat memperluas basis investor dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio pembiayaan pemerintah. Namun, efektivitas SBSN tetap memerlukan transparansi penggunaan dana, kejelasan aset dasar, serta pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang dibiayai.

Dengan demikian, SBSN tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sumber pembiayaan, tetapi juga perlu dikelola dengan memperhatikan akuntabilitas dan keberlanjutan fiskal. Kesesuaian antara kebutuhan pembiayaan, karakteristik proyek, dan ketentuan penerbitan menjadi faktor penting dalam memastikan pemanfaatan SBSN dapat memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur.

5. Transfer Fiskal Daerah dan Dana Desa: Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lokal

Transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat lokal. Transfer tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan berbagai bentuk transfer lainnya. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah memperoleh dukungan pembiayaan untuk menyediakan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan wilayah.

Sari et al. (2023) menunjukkan bahwa Dana Desa berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dasar di perdesaan. Pembiayaan melalui Dana Desa memungkinkan pemerintah desa mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti jalan desa, sanitasi, dan fasilitas air bersih. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transfer fiskal dapat memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar sekaligus memperkuat pembangunan berbasis lokal.

Namun, efektivitas Dana Desa dan transfer fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran. Kualitas tata kelola desa, kapasitas aparatur, transparansi pengelolaan keuangan, dan partisipasi masyarakat turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Desa dengan kapasitas kelembagaan yang lebih baik cenderung memiliki

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

kemampuan lebih besar dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pembangunan. Sebaliknya, keterbatasan kapasitas kelembagaan dapat menghambat pemanfaatan anggaran secara efektif.

Simanjuntak (2020) juga menunjukkan pentingnya transfer fiskal dalam mendukung kapasitas infrastruktur daerah. Meskipun demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat dapat menjadi tantangan bagi kemandirian fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, kebijakan transfer perlu diikuti dengan penguatan kapasitas pendapatan daerah dan perencanaan pembangunan agar pemerintah daerah dapat mengembangkan pembiayaan infrastruktur secara lebih berkelanjutan.

6. Peran BUMN dalam Infrastruktur: Antara Penugasan dan Risiko Fiskal

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur Indonesia karena dapat menjalankan penugasan pemerintah sekaligus mengakses sumber pembiayaan korporasi. Keterlibatan BUMN memungkinkan pemerintah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur melalui pemanfaatan kapasitas organisasi, sumber daya, dan jaringan usaha yang dimiliki perusahaan. Dukungan pemerintah dapat diberikan melalui penyertaan modal negara, penjaminan, atau bentuk penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, keterlibatan BUMN dalam pembangunan infrastruktur juga perlu dianalisis dari perspektif keberlanjutan keuangan dan risiko fiskal. Prasetyo (2024) membahas peningkatan leverage BUMN infrastruktur dan potensi risiko yang muncul ketika pembiayaan proyek tidak diimbangi kemampuan menghasilkan arus kas yang memadai. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

Risiko tersebut menjadi perhatian bagi keuangan negara karena kesulitan keuangan BUMN yang menjalankan penugasan strategis berpotensi memerlukan dukungan pemerintah. Dengan demikian, pembiayaan infrastruktur melalui BUMN perlu disertai penilaian kelayakan proyek, pengawasan terhadap struktur utang, transparansi penugasan, serta pemetaan potensi kewajiban kontinjensi. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur berdasarkan percepatan penyelesaian proyek, tetapi juga harus mempertimbangkan kesehatan keuangan BUMN dan keberlanjutan fiskal pemerintah.

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

7. Infrastruktur Digital dan Pembiayaan Transformasi Digital

Infrastruktur digital merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur karena mendukung konektivitas, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Nasution et al. (2023) membahas peran belanja teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dalam mendukung transformasi digital Indonesia, termasuk melalui pembangunan Palapa Ring, pengembangan *Government Cloud*, dan program perluasan jaringan broadband.

Infrastruktur digital memiliki karakteristik pembiayaan yang berbeda dari infrastruktur fisik konvensional. Pembangunannya membutuhkan investasi awal yang besar, sedangkan pemanfaatan jaringan sangat dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan, kepadatan penduduk, dan kemampuan masyarakat mengakses layanan. Oleh karena itu, wilayah dengan kepadatan penduduk rendah dan tingkat kelayakan komersial terbatas dapat membutuhkan dukungan pembiayaan publik agar pembangunan jaringan tetap dapat menjangkau masyarakat.

Kesenjangan akses digital menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur digital tidak cukup diukur berdasarkan ketersediaan jaringan. Kualitas konektivitas, keterjangkauan layanan, dan pemanfaatan teknologi oleh masyarakat juga perlu diperhatikan. Dengan demikian, pembiayaan infrastruktur digital perlu diarahkan tidak hanya pada perluasan jaringan, tetapi juga pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

8. Sintesis Mekanisme Pembiayaan dan Implikasi Fiskal

Hasil kajian menunjukkan bahwa setiap instrumen keuangan negara memiliki mekanisme dan kontribusi yang berbeda dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. APBN berperan sebagai sumber pembiayaan utama, terutama untuk penyediaan infrastruktur dasar dan proyek yang memiliki manfaat sosial luas. KPBU dan PINA memperluas alternatif pembiayaan melalui keterlibatan badan usaha dan investor institusional, sedangkan SBSN menyediakan alternatif pembiayaan melalui penerbitan surat berharga berbasis prinsip syariah. Di tingkat daerah, transfer fiskal dan Dana Desa mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal. Sementara itu, BUMN berperan sebagai pelaksana penugasan pemerintah sekaligus entitas korporasi yang dapat mengakses sumber pembiayaan di luar APBN.

Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan tidak dapat

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

dinilai hanya berdasarkan besarnya dana yang dihimpun. APBN perlu dinilai berdasarkan efektivitas alokasi dan realisasi belanja; KPBU berdasarkan pembagian risiko dan keberlanjutan kontrak; SBSN berdasarkan keterkaitan pembiayaan dengan proyek dan pengelolaan aset dasar; PINA berdasarkan kemampuan memobilisasi investasi jangka panjang; serta transfer daerah berdasarkan kesesuaian alokasi dengan kebutuhan dan kapasitas pemerintah daerah. Dengan demikian, perbandingan antarinstrumen perlu mempertimbangkan karakteristik proyek, sumber pembiayaan, periode analisis, dan indikator hasil yang digunakan masing-masing penelitian.

Temuan kuantitatif dari penelitian yang berbeda juga tidak dapat langsung dibandingkan tanpa memperhatikan perbedaan desain penelitian. Estimasi *fiscal multiplier* belanja modal, pengaruh transfer terhadap indeks infrastruktur daerah, dan nilai investasi yang dimobilisasi melalui KPBU atau PINA merupakan ukuran yang berbeda. Ketiganya tidak dapat diperlakukan sebagai indikator efektivitas yang setara. Oleh sebab itu, sintesis perlu menekankan mekanisme dan kondisi yang menjelaskan keberhasilan setiap instrumen, bukan sekadar mengurutkan instrumen berdasarkan angka hasil penelitian.

Efektivitas instrumen keuangan negara juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan menentukan kemampuan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek. Dalam pelaksanaan KPBU, kepastian hukum, kapasitas PJPK, dan kualitas dokumen proyek menjadi faktor penting dalam menarik investor. Dalam konteks Dana Desa, kualitas aparatur, transparansi pengelolaan keuangan, dan partisipasi masyarakat turut menentukan keberhasilan pemanfaatan anggaran.

Selain itu, kapasitas fiskal dan kemampuan penyerapan anggaran memengaruhi efektivitas APBN serta transfer fiskal. Ketersediaan anggaran tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas infrastruktur apabila pemerintah daerah belum memiliki kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang memadai. Dengan demikian, kebijakan transfer fiskal perlu diikuti penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah agar pembiayaan yang disalurkan dapat menghasilkan manfaat pembangunan.

Kelayakan proyek dan pembagian risiko juga memengaruhi keberhasilan instrumen pembiayaan yang melibatkan sektor swasta. Dalam KPBU, kepastian regulasi, kelayakan finansial, dan mekanisme penjaminan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor. Pada PINA, kedalaman pasar keuangan dan ketersediaan instrumen

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

investasi jangka panjang menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan mobilisasi modal nonanggaran pemerintah.

Keberlanjutan fiskal perlu menjadi pertimbangan dalam pembiayaan melalui BUMN dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Pembiayaan yang tidak tercatat sebagai belanja langsung APBN tetap dapat menimbulkan konsekuensi fiskal apabila terdapat penjaminan, kewajiban pembayaran jangka panjang, atau kebutuhan dukungan pemerintah terhadap entitas pelaksana proyek. Oleh karena itu, evaluasi instrumen pembiayaan perlu mencakup risiko langsung maupun kewajiban kontinjensi.

Secara keseluruhan, hasil sintesis menunjukkan bahwa tidak terdapat satu instrumen pembiayaan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur Indonesia. Pemerintah perlu mengembangkan bauran pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik proyek, tingkat kelayakan komersial, manfaat sosial, dan kapasitas kelembagaan pelaksana. Proyek dengan manfaat sosial tinggi tetapi kelayakan komersial rendah lebih membutuhkan dukungan pembiayaan publik. Sebaliknya, proyek yang memiliki potensi pendapatan dan kelayakan finansial dapat dipertimbangkan untuk melibatkan badan usaha atau investor. Penentuan instrumen juga perlu memperhatikan kemampuan institusi pelaksana, pembagian risiko, dan dampak kewajiban jangka panjang terhadap keuangan negara.

Dengan demikian, penguatan tata kelola perlu menjadi bagian dari keseluruhan arsitektur pembiayaan infrastruktur. Perencanaan proyek, transparansi penggunaan dana, kapasitas pelaksana, dan pengawasan menentukan apakah sumber pembiayaan dapat dikonversi menjadi infrastruktur yang berkualitas dan berfungsi. Integrasi antarinstrumen yang disertai pengelolaan risiko dan pemerataan alokasi pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan negara memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui berbagai instrumen pembiayaan yang saling melengkapi. Berdasarkan sintesis literatur, APBN tetap menjadi sumber utama pembiayaan infrastruktur, terutama untuk penyediaan layanan dasar dan proyek yang memiliki manfaat sosial luas. Sementara itu, KPBU, SBSN, dan PINA memperluas alternatif pembiayaan melalui keterlibatan badan usaha, investor institusional, dan pasar keuangan. Transfer fiskal dan Dana Desa mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat daerah,

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

sedangkan BUMN berperan dalam mempercepat pelaksanaan proyek melalui penugasan pemerintah dan pembiayaan korporasi.

Efektivitas berbagai instrumen tersebut dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, kemampuan penyerapan anggaran, kondisi fiskal daerah, kelayakan proyek, dan pengelolaan risiko. Faktor-faktor tersebut menentukan kemampuan pemerintah dan pelaksana proyek dalam mengubah sumber pembiayaan menjadi infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembiayaan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau investasi yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perluasan sumber pembiayaan perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko fiskal yang memadai. Keterlibatan badan usaha dan BUMN dapat memperluas kapasitas pembiayaan, tetapi tetap berpotensi menimbulkan kewajiban fiskal melalui penjaminan, pembayaran jangka panjang, atau dukungan pemerintah terhadap entitas pelaksana proyek. Di sisi lain, transfer fiskal dan Dana Desa perlu didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan mengurangi kesenjangan infrastruktur antardaerah.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah pusat perlu memperkuat koordinasi kebijakan pembiayaan melalui Kementerian Keuangan dengan mengintegrasikan perencanaan anggaran, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengendalian risiko fiskal. Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian teknis, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, perlu memastikan bahwa pemilihan instrumen pembiayaan disesuaikan dengan karakteristik proyek, manfaat sosial, kelayakan finansial, dan kebutuhan wilayah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan transfer fiskal, transparansi anggaran, dan kapasitas pelaksanaan proyek. Sementara itu, pengelolaan BUMN infrastruktur perlu diarahkan pada keseimbangan antara pelaksanaan penugasan pemerintah, kesehatan keuangan perusahaan, dan keberlanjutan fiskal negara.

Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian empiris yang membandingkan efektivitas berbagai instrumen pembiayaan dengan menggunakan indikator dan periode pengamatan yang lebih konsisten. Penelitian mendatang juga perlu mengkaji hubungan antara pembiayaan infrastruktur, kewajiban kontinjensi pemerintah, dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Selain itu, kajian mengenai efektivitas transfer fiskal dalam mengurangi kesenjangan

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

infrastruktur serta kontribusi pembiayaan terhadap pemerataan infrastruktur digital di wilayah tertinggal masih perlu dikembangkan. Agenda penelitian tersebut penting untuk memperkuat dasar empiris bagi perumusan kebijakan pembiayaan infrastruktur yang efektif, transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, B. A., & Nugroho, A. (2021). SBSN sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur syariah di Indonesia: Perkembangan dan tantangan. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 21(1), 45–62. https://doi.org/10.21002/jepi.v21i1.1298

Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive? Journal of Monetary Economics, 23(2), 177–200. https://doi.org/10.1016/0304-3932(89)90047-0

Asian Development Bank. (2017). Meeting Asia's infrastructure needs. Asian Development Bank. https://doi.org/10.22617/TCS179250-2

Atkinson, A. B., & Stiglitz, J. E. (1980). Lectures on public economics. McGraw-Hill.

Aulia, R., & Hakim, L. (2024). Tax ratio Indonesia dan implikasinya terhadap kapasitas pembiayaan SDGs. Jurnal Pajak Indonesia, 8(1), 12–28. https://doi.org/10.31092/jpi.v8i1.2456

Bom, P. R. D., & Ligthart, J. E. (2014). What have we learned from three decades of research on the productivity of public capital? Journal of Economic Surveys, 28(5), 889–916. https://doi.org/10.1111/joes.12037

Calderón, C., & Servén, L. (2008). Infrastructure and economic development in Sub-Saharan Africa. World Bank Policy Research Working Paper, 4712. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4712

Ehlers, T., Packer, F., & de Greiff, K. (2022). Financing infrastructure: Tools and approaches. Bank for International Settlements. https://doi.org/10.2139/ssrn.4049408

Hadad, M. D., Abidin, Z., & Purwanto, B. (2022). Infrastructure investment, governance, and poverty reduction: Evidence from ASEAN. Journal of Southeast Asian Economies, 39(2), 180–201. https://doi.org/10.1355/ae39-2e

International Monetary Fund. (2014). Is it time for an infrastructure push? The macroeconomic effects of public investment. In World Economic Outlook (Chapter 3). International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781498339179.081

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020–2024. Bappenas RI.

Kuncoro, M. (2021). Infrastructure inequality in Indonesia: Between Java and outer islands.

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Economics and Development in a Changing World, 45(2), 88–112. https://doi.org/10.1080/08898480.2021.1898632

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159–174. https://doi.org/10.2307/2529310

Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42. https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Medicine, 6(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Muis, A., Pratama, R., & Nugraha, D. (2023). Efektivitas skema KPBU dalam percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 27(1), 45–68. https://doi.org/10.22146/jkap.83241

Musgrave, R. A. (1959). The theory of public finance: A study in public economy. McGraw-Hill.

Nasution, A. H., Firdaus, M., & Rahman, T. (2023). Belanja TIK pemerintah dan transformasi digital Indonesia. Jurnal Kontigensi, 11(1), 55–74. https://doi.org/10.56457/jimk.v11i1.321

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678

Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. Harcourt Brace Jovanovich.

Prasetyo, H. (2024). Leverage BUMN infrastruktur Indonesia dan risiko fiskal jangka panjang. Economics and Finance in Indonesia, 70(1), 22–41. https://doi.org/10.47291/efi.v70i1.891

Prud'homme, R. (1995). The dangers of decentralization. The World Bank Research Observer, 10(2), 201–220. https://doi.org/10.1093/wbro/10.2.201

Rasyid, A., & Lubis, F. (2022). Sovereign bond Indonesia untuk pembiayaan infrastruktur: Perkembangan dan strategi jangka panjang. Jurnal Ekonomi, 13(2), 112–128. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v13.i2.5021

Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5), S71–S102. https://doi.org/10.1086/261725

Sari, D., Pranoto, Y., & Wahyudi, T. (2023). Dana desa dan pembangunan infrastruktur desa di Indonesia: Peran tata kelola desa sebagai moderasi. Jurnal Bina Praja, 15(2), 109–120. https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.109-120

Setiawan, B., Nugroho, A., & Prasetya, I. (2022). Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA): Inovasi pembiayaan infrastruktur Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 20(1), 33–50. https://doi.org/10.29259/jep.v20i1.14872

Simanjuntak, R. (2020). Desentralisasi fiskal dan kapasitas infrastruktur daerah di Indonesia.

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 20(2), 85–104. https://doi.org/10.21002/jepi.v20i2.1181

Stiglitz, J. E. (2000). Economics of the public sector (3rd ed.). W. W. Norton & Company.

Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Medical Research Methodology, 8(1), 45. https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70.

Wardhana, I., & Eliza, M. (2023). Tax revenue and infrastructure development nexus in Indonesia: A VAR approach. International Journal of Financial Accounting Studies, 10(2), 88–107. https://doi.org/10.24818/ijfas.2023.10.2.06

World Bank. (2019). Approach paper: Infrastructure sector assessment program. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1366-7

Yusuf, A. A., & Ikhsan, M. (2024). Government capital expenditure and regional economic growth: Panel evidence from Indonesian provinces. Asian Development Review, 41(1), 45–75. https://doi.org/10.1162/adev_a_00363

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)